

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH
DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA PADANG**

Oleh :

**AMELIA
06 206 055**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Master Sains
Pada Program Pascasarjana Universitas Andalas**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2008**

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang

Oleh : Amelia (06 206 055)

(Dibawah Bimbingan : Prof. Dr. Syafrizal, SE,MA dan Prof. Dr. Sofyardi, SE, MA)

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Padang; (2) pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Padang; (3) pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Padang; (4) pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Padang.

Jenis penelitian ini digolongkan kepada penelitian deskriptif dan asosiatif yang melihat pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series tahun 1997 - 2006 di kota Padang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, dikumpulkan melalui publikasi lembaga pemerintah yang resmi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan induktif.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa (1) Pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Padang pada tingkat $\text{sig} = 0,010 < \alpha = 0,05$ dengan besar pengaruhnya sebesar 0,053 ; (2) Retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Padang pada tingkat $\text{sig} = 0,015 < \alpha = 0,05$ dengan besar pengaruhnya sebesar 0,162 ; (3) Dana perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Padang pada tingkat $\text{sig} = 0,040 < \alpha = 0,05$ dengan besar pengaruhnya sebesar 0,004 ; (4) Terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Padang pada tingkat $\text{sig} = 0,000 < \alpha = 0,05$ dengan besar pengaruhnya sebesar 92,5%.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi penulis menyarankan agar pemerintah terus melakukan proses sosialisasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah; lebih jeli dalam memanfaatkan dana yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan; berlaku tegas dan memberikan punishment yang keras kepada mereka yang melalaikan kewajiban pajak dan retribusi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Selama tiga dasawarsa terakhir ini, perhatian utama masyarakat perekonomian dunia tertuju pada cara-cara untuk mempercepat tingkat pertumbuhan pendapatan nasional. Pada akhir setiap tahun masing-masing negara selalu mengumpulkan data-data statistiknya yang berkenaan dengan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto relatifnya dan dengan penuh harap mereka menantikan munculnya angka-angka pertumbuhan yang membesarkan hati. (Michael P. Todaro, 1999).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor-faktor produksi juga turut meningkat.

Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Itulah sebabnya pengertian output nasional atau yang lebih dikenal sebagai

pendapatan nasional merupakan pokok pembahasan utama dalam pengertiannya tentang pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) (Pratama Raharja dan Mandala Manurung, 2001 : 178).

Dalam menjalankan perekonomian, pemerintah turut campur tangan dengan menggunakan alat, salah satunya adalah kebijakan fiskal. Menurut Lipsey (1981) kebijakan fiskal memiliki pengertian kekuasaan pemerintah untuk menggunakan hasil pendapatan pajak dan pengeluarannya dalam rangka mempengaruhi arus lingkaran pendapatan. Pengertian yang lebih lengkap dinyatakan oleh Spencer (1977) yang menurutnya kebijakan fiskal adalah penggunaan kekuasaan pemerintah untuk mengenakan pajak dan untuk mengeluarkan uang dalam rangka usaha untuk mencapai kestabilan harga, membantu menekan fluktuasi-fluktuasi pada gerakan konyungter, dan membawa output serta kesempatan kerja perekonomian bersangkutan ke tingkat yang diinginkan.

Indonesia sendiri telah menempatkan pajak sebagai sumber penerimaan negara, baik dimasa penduduk penjajah hingga sekarang ini. Pada zaman dahulu dikenal istilah "belasting" untuk penanaman pajak yang berasal dari bahasa Belanda. Namun seiring dengan perkembangan sistem kenegaraan yang kita alami, maka untuk iuran masyarakat kepada negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapat jasa timbal tersebut telah dinamai pajak. Mengingat urgensi dalam menopang perjalanan dan kehidupan negara sejak awal kemerdekaan para pendiri negara (*founders father*) telah menempatkan

pajak dalam kontribusi negara, yang diamanatkan dalam pasal 23 ayat (2) UUD 45 bahwa "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang".

Dalam pemungutannya pajak ini dibedakan dalam dua kategori, antara lain pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang pemungutannya sampai ke daerah dan distor seluruhnya ke pemerintah pusat. Hal ini akan menjadi penerimaan pajak pemerintah pusat yang nantinya masuk ke dalam APBN. Dari APBN akan dialokasikan kembali pada pemerintah daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dikelola di daerah dan digunakan sebagai sumber penerimaan daerah dan masuk dalam APBD. Hal ini akan merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya digunakan sebagai sumber pembiayaan belanja rutin dan pembangunan oleh pemerintah daerah.

Di samping pajak, sebagai sumber penerimaan pemerintah daerah yang lain adalah retribusi. Retribusi merupakan pungutan pemerintah yang memiliki hubungan langsung dengan prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah, sehingga berbeda dengan pajak yang pemungutannya tidak memiliki hubungan langsung sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah dan bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan dalam keuangan daerah yang digali dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Menurut Susijhati B. Hirawan (1998 : 124) masalah keuangan merupakan pokok

pajak dalam kontribusi negara, yang diamanatkan dalam pasal 23 ayat (2) UUD 45 bahwa "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang".

Dalam pemungutannya pajak ini dibedakan dalam dua kategori, antara lain pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang pemungutannya sampai ke daerah dan distor seluruhnya ke pemerintah pusat. Hal ini akan menjadi penerimaan pajak pemerintah pusat yang nantinya masuk ke dalam APBN. Dari APBN akan dialokasikan kembali pada pemerintah daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dikelola di daerah dan digunakan sebagai sumber penerimaan daerah dan masuk dalam APBD. Hal ini akan merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya digunakan sebagai sumber pembiayaan belanja rutin dan pembangunan oleh pemerintah daerah.

Di samping pajak, sebagai sumber penerimaan pemerintah daerah yang lain adalah retribusi. Retribusi merupakan pungutan pemerintah yang memiliki hubungan langsung dengan prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah, sehingga berbeda dengan pajak yang pemungutannya tidak memiliki hubungan langsung sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah dan bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan dalam keuangan daerah yang digali dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Menurut Susijhati B. Hirawan (1998 : 124) masalah keuangan merupakan pokok

permasalahan bagi daerah dalam menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat. Di samping itu, pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yang kadang-kadang disertai dengan arus urbanisasi yang luar biasa di daerah perkotaan menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja, meningkatkan permintaan akan kebutuhan hidup masyarakat, seperti sandang, prasarana kesehatan, pendidikan, pengangkutan dan komunikasi, listrik, air bersih, kesejahteraan sosial dan lain-lain.

Di lain pihak, sumber-sumber penerimaan pajak yang terbatas harus diusahakan untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dalam keadaan seperti ini bantuan dari pemerintah pusat menjadi bagian yang sangat penting bagi keuangan daerah (Wantara, 1995 : 2).

Dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya, pemerintah daerah Sumatera Barat telah menempuh berbagai kebijaksanaan. Diantaranya adalah memerlukan kebijaksanaan menoleh keluar (*Outward looking policy*) yang bertujuan untuk mengembangkan kerjasama di bidang ekonomi dan bisnis dengan pihak luar daerah maupun luar negeri sejak tahun 1994. Realisasi dari kebijaksanaan ini adalah masuknya Sumatera Barat dalam kerjasama Sub Regional IMS-GS (segi tiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Thailand) yang diharapkan dapat memacu peningkatan perdagangan dan penanaman modal swasta.

Pembangunan daerah adalah merupakan bagian dari pembangunan wilayah yang komponennya berisikan kegiatan-kegiatan pembangunan

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kepada proses analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis maka dapat diajukan beberapa kesimpulan yang merupakan inti yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama ditemukan nilai signifikan sebesar 0,007 sedangkan dalam melakukan pengujian digunakan tingkat kesalahan atau alpha sebesar 0,05. Berarti nilai sig sebesar $0,007 < \alpha 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dibuktikan kebenarannya.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua ditemukan nilai signifikan sebesar 0,031 sedangkan dalam melakukan pengujian digunakan tingkat kesalahan atau alpha sebesar 0,05. Berarti nilai sig sebesar $0,031 < \alpha 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dibuktikan kebenarannya.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga ditemukan nilai p-value sebesar 0,040 dalam pengujian digunakan tingkat kesalahan atau alpha sebesar 0,05. Berarti nilai sig $0,040 < \alpha 0,05$ maka dapat

disimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah.

4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat ditemukan nilai signifikan sebesar 0,000 sedangkan dalam melakukan pengujian digunakan tingkat kesalahan atau alpha sebesar 0,05. Berarti nilai sig sebesar $0,000 < \alpha 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara simultan.

5.2 Keterbatasan Peneliti

Penelitian yang telah penulis selesaikan ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang mempengaruhi kesempurnaan hasil pengujian.

Keterbatasan yang peneliti temukan dalam penyusunan thesis ini adalah:

1. Masih terlalu sempitnya waktu pengambilan sampel yang digunakan sehingga mempengaruhi kesempurnaan hasil yang ditemukan dalam pengujian hipotesis.
2. Adanya keterbatasan pengetahuan dan referensi yang peneliti miliki sehingga masih ditemukan sejumlah variabel yang juga mempengaruhi pertumbuhan perekonomian sebuah daerah sehingga mempengaruhi kesempurnaan hasil yang ditemukan dalam penelitian ini.

5.3 Saran

Sesuai dengan hasil yang diperoleh didalam penelitian ini maka diajukan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi pemerintah daerah disarankan agar terus melakukan proses sosialisasi terhadap pajak dan retribusi bagi pihak-pihak yang diperkenankan sebagai wajib pajak, karena ketaatan mereka dalam membayar pajak akan mempengaruhi pendapatan asli daerah dan tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian sebuah daerah.
2. Bagi pemerintah daerah disarankan agar lebih jeli dalam memanfaatkan dana yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membangun fundamental perekonomian daerah yang kuat.
3. Bagi pemerintah disarankan agar berlaku tegas dan memberikan panishment yang keras kepada mereka yang melalaikan kewajiban pajak dan retribusi, karena kontribusi yang diberikan pajak dalam proses peningkatan pertumbuhan perekonomian cukup besar.
4. Bagi peneliti dimasa datang disarankan agar menggunakan jangka waktu pengambilan data yang lebih panjang, serta menggunakan beberapa variabel baru yang juga mempengaruhi pertumbuhan perekonomian sebuah daerah. Saran ini penting untuk dilaksanakan agar kekurangan yang terdapat didalam penelitian ini dapat disempurnakan dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J, 1989. *Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Daerah Indonesia, Kasus di Aceh, Jawa Timur, dan DKI Jakarta*, Yogyakarta. BPFE – UGM
- _____, 1991. *Sebagai Sumber Utama Pembangunan, Pajak Harus Memenuhi Struktur Pajak Yang Baik*, Jakarta. Yayasan Bina Pembangunan
- Alferd, W, 1998. *Economic Theory 1 dan 2* Jakarta, Ghalia Indonesia, IKAPII
- Arstrong, Harvey and Jim Taylor (1978), *Regional Economic Policy and Its Analysis*, Oxford : Philip Allan Publisher
- Arsyad Limcolin, Drs, 1998. *Ekonomi Manajerial, Ekonomi Makro Terapan untuk Manajemen Bisnis*, Edisi 3 Jakarta. Yogyakarta. BPFE – UGM
- Atmosudirjo, 1970. *Masalah Pengembangan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta. Lembaga Administrasi Negara
- Bawazler, F. 1998, *Central – Local Fiscal Relation in Indonesia*. Ph. D Dissertation (Unpublished). USA. The University of Maryland
- Biro Pusat Statistik, 1993 – 1999. *Indikator Ekonomi*, Jakarta
- _____, 1999, *Kota Padang Dalam Angka*, Padang, BAPPEDA
- Blair, Jhon, P. (1991), *Urban and Regional Economics*, Homewood, IL : Irwan Co
- Boediono (2001), *Indonesia Menghadapi Ekonomi Global*, Seri Perekonomian Indonesia No. 1, Yogyakarta : PT. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM
- Burki, Shahid. J.G.E. Perry and W.R. Dillinger (eds) (2000) *Beyon The Centre. Desentralizing The State*, Prepublication Conference Edition, Washington DC. The World Bank
- Carino, Isindro, D. (1995), *Transforming Local Government Executives into Efective Managers*, Quezon City : Asia Research and Management Corporation
- Danuredja, 1961. *Struktur Administrasi dan Sistem Pemerintahan di Indoensia*, Jakarta. Lembaga Administrasi Negara